

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri batik merupakan bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai historis dan simbolik yang kuat. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) secara resmi mengakui batik sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Sejak pengakuan tersebut diberikan, batik semakin memperoleh perhatian dan penghargaan dari masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberadaan industri batik ini memiliki kontribusi penting dalam perekonomian Indonesia. Selain berfungsi sebagai pelestari warisan budaya, batik juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Perkembangan batik tidak hanya terbatas sebagai kain tradisional, tetapi telah menjadi produk bernilai jual tinggi. Meskipun industri batik memberikan manfaat ekonomi bagi perajin dan pelaku usaha, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia, persaingan dengan produk tekstil lainnya, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan kimia dalam proses pewarnaan.

Upaya menjaga keberlanjutan industri batik di Indonesia diwujudkan melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah guna melindungi, mengembangkan, dan mempromosikan batik sebagai produk budaya sekaligus sektor ekonomi strategis. Salah satu regulasi yang dimaksud adalah Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menjaga dan mengembangkan warisan budaya, termasuk batik melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta program pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan industri berbasis budaya. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan serta menjamin perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi perajin batik. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari artikel resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri kerajinan dan batik mampu menyerap sekitar 1,52 juta tenaga kerja yang tersebar lebih dari 47.700 unit usaha di berbagai daerah di Indonesia. Apabila ditinjau dari distribusi wilayah, Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah dengan jumlah industri batik paling banyak, yakni terdiri atas 2.191 unit usaha mikro, kecil, dan menengah serta 108 unit usaha berskala menengah dan besar.

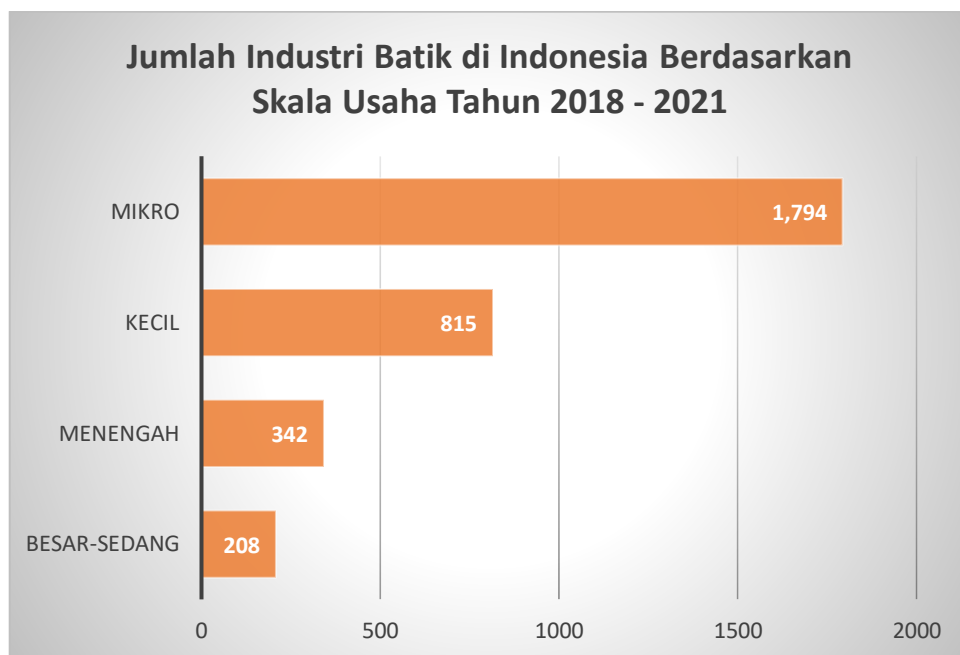
Gambar 1.1 Data Provinsi dengan Jumlah Industri Batik Terbanyak



Sumber: Katadata Media Network (2022)

Provinsi Jawa Tengah terlihat mendominasi dalam industri batik tahun 2018-2021 yang menunjukkan peran sentral provinsi ini dalam melestarikan dan mengembangkan kerajinan batik di Indonesia. Dominasi Provinsi Jawa Tengah dalam produksi batik mengindikasikan adanya konsentrasi keterampilan dan pengetahuan membatik di wilayah ini. Namun, dengan adanya jumlah industri yang besar, tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia juga menjadi sangat penting.

Gambar 1.2 Data Jumlah Industri Batik Berdasarkan Skala Usaha



Sumber: Katadata Media Network (2022)

Data yang diperoleh dari Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa jumlah unit usaha batik yang terdaftar di Indonesia mencapai sekitar 3.159 unit usaha. Informasi tersebut juga memperlihatkan bahwa kategori usaha batik berskala mikro merupakan yang paling

dominan jumlah mencapai 1.794 unit usaha. Dari rincian data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas industri batik di Indonesia beroperasi dalam skala kecil dengan sumber daya yang terbatas.

Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kawasan industri batik dengan keanekaragaman motif dan corak. Beberapa kabupaten dan kota di provinsi ini berkembang menjadi sentra produksi batik serta berfungsi sebagai destinasi kunjungan wisata, baik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Sejumlah wilayah di Jawa Tengah dikenal sebagai pusat penghasil batik yang menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan sehingga mampu menarik perhatian wisatawan lokal maupun asing. Kota Semarang termasuk salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki sentra industri batik yang cukup terkenal. Kota Semarang memiliki beberapa sentra industri batik yang tersebar di beberapa lokasi, seperti Sentra Batik Rejomulyo, Sentra batik Warna Alam, dan masih banyak lagi. Adapun berikut ini data yang menunjukkan jumlah sentra industri batik yang tersebar di Kota Semarang Tahun 2024.

Tabel 1.1 Sentra Industri Batik di Kota Semarang Tahun 2024

No.	Sentra Batik	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Perajin
1.	Sentra Batik Mangrove	Mangunharjo	Tugu	4
2.	Sentra Batik Rejomulyo	Rejomulyo	Semarang Timur	11

3.	Sentra Batik Warna Alam	Gunungpati	Gunungpati	20
4.	Sentra Batik Durenan	Mangunharjo	Tembalang	20
5.	Sentra Batik Kanfer	Pedalangan	Banyumanik	19
6.	Sentra Batik Meteseh	Meteseh	Tembalang	20

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Semarang (2024)

Dari data di atas menunjukkan bahwa di Sentra Batik Rejomulyo memiliki 11 perajin. Jumlah ini bisa dikatakan rendah jika dibandingkan dengan beberapa sentra batik lainnya, seperti Sentra Batik Warna Alam, Sentra Batik Durenan, dan Sentra Batik Meteseh yang memiliki 20 perajin. Secara keseluruhan, jumlah perajin di sentra batik Kota Semarang cukup bervariasi dari 4 hingga 20 orang.

Gambaran mengenai persoalan berkurangnya jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo dapat dilihat dari data yang dipublikasikan oleh Kompasiana, yang mana menunjukkan rendahnya jumlah perajin di wilayah Kampung Batik Rejomulyo dari tahun 2019 hingga tahun 2023 (Kompasiana, 2024).

Tabel 1.2 Jumlah Perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Perajin
2019	27
2020	27
2021	25
2022	24

2023	21
------	----

Sumber: Kompasiana, diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo menurun dari yang awalnya 27 orang pada tahun 2019 menjadi 21 orang pada tahun 2023. Dari jumlah penurunan tersebut menunjukkan adanya masalah penurunan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Permasalahan ini bukan hanya tentang motivasi individu perajin, akan tetapi juga berkaitan dengan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terpadu. Penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo mencerminkan permasalahan sumber daya manusia yang sedang dihadapi oleh industri batik di wilayah tersebut. Adapun juga informasi yang diperoleh dari artikel lain menunjukkan bahwa masih minimnya regenerasi yang terjadi di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang sehingga mengakibatkan perajin batik di kampung tersebut khawatir karena warisan budaya batik tidak ada yang meneruskan.

Dikutip dari artikel wawancara dengan salah satu produsen batik di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang. Menurut berita harian Indoraya.News yang ditulis oleh Dickri Tifani per tanggal 3 Oktober 2023 dalam wawancara yang dilakukan dengan Siti Afifah selaku salah satu perajin di Kampung Batik Rejomulyo Semarang mengungkapkan bahwa "Kata Siti, dirinya bersama perajin batik lainnya dihadapkan dengan permasalahan regenerasi. Hal ini membuatnya khawatir jika hingga sampai saat ini belum ada yang berkenan untuk meneruskan seni batik Khas Semarang-an itu" (Tifani, 2023). Adapun juga dalam artikel tersebut mengungkapkan bahwa Siti Afifah, selaku salah satu produsen batik di

Kampung Batik Rejomulyo mengungkapkan kegelisahannya karena minimnya regenerasi perajin batik sehingga mempengaruhi terhadap pemenuhan tingkat produksi batik.

Pada konteks ini, pemberdayaan masyarakat menjadi suatu aspek yang penting untuk mengatasi penurunan jumlah perajin. Namun, proses pemberdayaan tidak bisa dipandang sebagai tanggung jawab masyarakat semata. Kehadiran aktor pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memberikan pengaruh yang signifikan. Sebagai institusi publik, dinas ini memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro. Fungsi dari dinas ini, di antaranya meliputi pemberian pelatihan, fasilitasi permodalan, akses pasar, serta pendampingan usaha. Dari berbagai program yang dilaksanakan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berupaya dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan perajin sekaligus mendorong terbentuknya regenerasi perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengambil peran aktif dengan melakukan pelatihan membatik secara rutin di Kampung Batik Rejomulyo dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam membatik dan kemampuan manajerial perajin serta masyarakat yang berminat menjadi perajin batik. Pelatihan keterampilan meliputi proses pembuatan batik tulis dan cap, sedangkan pelatihan manajerial mencakup pengelolaan laporan keuangan dan pengembangan desain produk. Pelatihan ini biasanya dilakukan minimal dua kali dalam setahun dengan

menjalin kerja sama kepada pihak paguyuban Kampung Batik Rejomulyo. Akan tetapi, implementasi dari pelatihan ini masih belum memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menahan laju penurunan jumlah perajin batik di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut dalam mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan agar dapat mengatasi permasalahan penurunan jumlah perajin batik.

Dikutip dari artikel wawancara dengan Ketua Paguyuban Kampung Batik Semarang. Menurut berita harian Espos.id yang ditulis oleh Ria Aldila Putri per tanggal 2 Oktober 2023 dalam wawancara yang dilakukan dengan Eko Haryanto mengungkapkan bahwa ” Menurut Eko, sebenarnya potensi batik di Semarang sangatlah besar. Namun hal tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan produksi batik oleh warga Kota Semarang atau mininmnya jumlah perajin batik di Ibu Kota Jawa Tengah (Jateng) itu” (Putri, 2023). Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa meskipun terdapat pelatihan untuk meningkatkan keterampilan membatik, hanya sedikit peserta pelatihan yang bertahan dalam usaha ini. Kampung Batik Rejomulyo, sebagai salah satu sentra industri batik di Kota Semarang juga menghadapi permasalahan serupa dengan semakin berkurangnya jumlah perajin batik yang aktif.

Selain itu juga, keberadaan Dinas Perindustrian Kota Semarang memiliki kontribusi yang penting dalam mendukung keberlangsungan industri batik di wilayah tersebut. Dinas Perindustrian Kota Semarang berperan sebagai instansi teknis yang fokus pada pembinaan, pengembangan, serta peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, termasuk industri kreatif berbasis budaya, seperti

batik. Melalui berbagai kegiatan, seperti fasilitasi peralatan produksi, penyelenggaraan pameran industri kreatif, serta pelatihan desain dan inovasi produk, Dinas Perindustrian berupaya untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan industri batik di Kota Semarang. Selain itu, dinas ini juga memberikan pendampingan teknis kepada para pelaku industri agar mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu perajin batik di Kota Semarang, khususnya di Kampung Batik Rejomulyo, untuk terus mempertahankan keberadaan serta meningkatkan produktivitasnya.

Kampung Batik Rejomulyo yang berada di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang merupakan kawasan sentra kerajinan batik yang dikenal di wilayah Semarang. Kampung ini tidak hanya menawarkan produk batik khas Semarang, tetapi juga menjadi destinasi wisata budaya yang memberikan pengalaman baru bagi pengunjung untuk melihat langsung proses pembuatan batik. Namun, tantangan terkait penurunan jumlah perajin batik dirasakan di kampung ini. Kondisi ini menciptakan kekhawatiran bagi masyarakat setempat khususnya perajin batik di wilayah Kampung Batik Rejomulyo karena warisan budaya batik tidak ada yang melanjutkan. Setiap proses pembuatan batik memerlukan beberapa tenaga kerja, sedangkan hanya sedikit perajin yang tersedia sehingga menyebabkan kemampuan produksi menjadi sangat terbatas. Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo bukan hanya menjadi persoalan teknis semata, akan tetapi juga menyangkut pada aspek partisipasi masyarakat dan peran pemerintah.

Penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo tidak hanya mencerminkan persoalan individu perajin, akan tetapi menunjukkan adanya permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat yang belum berjalan secara maksimal. Pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program pelatihan, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kapasitas, pendampingan berkelanjutan, serta perlindungan terhadap keberlangsungan usaha perajin. Kondisi di Kampung Batik Rejomulyo memperlihatkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai program pembinaan dan pelatihan dari pemerintah daerah, hasil yang dicapai belum mampu menahan laju penurunan jumlah perajin secara signifikan. Masalah pemberdayaan dapat dilihat dari belum maksimalnya hasil program pelatihan dalam jangka panjang. Program pelatihan membatik lebih menekankan aspek teknis produksi, sedangkan pendampingan usaha dan regenerasi perajin belum menjadi perhatian utama sehingga mengakibatkan sebagian peserta pelatihan tidak melanjutkan kegiatan membatik secara berkelanjutan.

Secara teoretis, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Pada konteks Kampung Batik Rejomulyo, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena penurunan jumlah perajin masih terus terjadi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara program pemberdayaan yang dirancang oleh pemerintah dengan kebutuhan perajin di lapangan. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa pemberdayaan belum sepenuhnya mampu menjaga dalam keberlangsungan perajin sebagai pelaku utama industri batik. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini tidak hanya

terletak pada berkurangnya jumlah perajin, tetapi juga pada bagaimana pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam menghadapi kondisi tersebut. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis pemberdayaan perajin yang melibatkan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat perajin, serta bagaimana pemberdayaan tersebut dapat berkontribusi dalam mengatasi penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang.

Fenomena penurunan jumlah perajin batik di Kampung Batik Rejomulyo bukan hanya persoalan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku utama, melainkan merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang melibatkan berbagai pihak atau multi *stakeholders*. Pendekatan pemberdayaan yang diterapkan dalam penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, komunitas perajin, hingga sektor swasta sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan pemberdayaan sebagai landasan utama untuk menganalisis bagaimana sinergi antar pemangku kepentingan dapat menciptakan model pemberdayaan yang efektif dalam mengatasi penurunan jumlah perajin batik. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat multi *stakeholders* yang mengkaji peran serta interaksi antara pemerintah, masyarakat perajin batik sebagai pelaku utama, serta pihak lain yang berkepentingan dalam pengembangan dan pelestarian industri batik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan perajin belum sepenuhnya mampu melindungi keberlanjutan profesi perajin batik, yang ditunjukkan dengan masih terjadinya penurunan jumlah perajin dari tahun ke tahun. (Halaman 5–6)
2. Belum terdapat mekanisme pendampingan jangka panjang sebagai bentuk perlindungan usaha perajin, sehingga hasil pelatihan belum mampu mencegah perajin keluar dari aktivitas membatik. (Halaman 8–9)
3. Upaya pemberdayaan yang dilakukan belum terintegrasi secara optimal dengan strategi perlindungan terhadap penurunan jumlah perajin, terutama dalam mendorong minat generasi muda untuk tetap melanjutkan profesi sebagai perajin batik. (Halaman 9)

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai pemberdayaan perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Memperluas perspektif keilmuan dalam bidang administrasi publik, khususnya mengenai proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah daerah.
2. Menambah wawasan teoritis mengenai penerapan konsep manajemen publik dalam mempertahankan dan mengatasi penurunan jumlah pelaku usaha lokal.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk pengembangan teori mengenai proses pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

1. Memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan penelaahan serta penyusunan arah kebijakan strategis guna mempertahankan eksistensi industri batik sebagai bagian dari warisan budaya.

2. Menjadi acuan dalam meningkatkan sinergi antar perangkat daerah untuk mendukung keberlangsungan perajin batik di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang.
3. Membantu pemerintah dalam merancang program pemberdayaan UMKM yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha lokal.

b. Bagi Peneliti dan Akademisi

1. Menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji peran institusi publik mengenai pemberdayaan UMKM berbasis lokalitas.
2. Menambah kajian akademik tentang peningkatan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam usaha berbasis budaya, khususnya dalam menghadapi tantangan regenerasi tenaga kerja.
3. Memberikan dasar empiris untuk penelitian lebih lanjut mengenai inovasi dan keberlanjutan industri batik dalam menghadapi tantangan yang terjadi.

c. Bagi Masyarakat dan Perajin Batik

1. Meningkatkan kesadaran bagi perajin batik akan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah dalam mempertahankan usaha.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya regenerasi dan pelestarian keterampilan membatik sebagai warisan budaya.

3. Mendorong kolaborasi antara masyarakat, komunitas perajin, dan pihak terkait dalam menciptakan solusi yang dapat mendukung keberlanjutan industri batik di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Denny Febian, Widyawati, Kresna Adhi Prahmana Putra, Nihayatus Sholichah (2024). Judul Penelitian: Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Kampung Batik Tin Di Kelurahan Gundih Kota Surabaya. Nama Jurnal: Majalah Ilmiah “CAHAYA	Mengkaji bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi dan pelestarian budaya di Kampung Batin Tin melalui program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, penguatan kapasitas ekonomi, dan kolaborasi antar	Menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat yang berakar pada pembangunan partisipatif, teori kemandirian, teori perubahan sosial, modal sosial, serta konsep keberlanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya melalui pelatihan, bantuan fasilitas, dan kebijakan pasar berhasil meningkatkan kualitas produk batik, kemandirian ekonomi pengrajin, dan pelestarian budaya batik. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga terampil di bidang manajemen, rendahnya minat generasi muda, serta koordinasi yang belum	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas batik dan kemandirian ekonomi pengrajin. Kendala utama berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya minat generasi muda, dan masalah akses pasar juga menjadi temuan di kedua penelitian.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini memberikan fokus yang lebih luas pada pelestarian budaya dan peran pemerintah dari tiga fungsi (fasilitator, regulator, katalisator), sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memusatkan pada solusi praktis kolaborasi langsung antara Dinas Koperasi UMKM dengan masyarakat dalam konteks penurunan perajin batik di Kampung

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	ILMU”, Vol. 6, No. 2. Link: https://jurnal.stiape.mbangunanjember.ac.id/index.php/cahayailmu/article/view/414/387	pemangku kepentingan.			optimal antar pemangku kepentingan.		Batik Rejomulyo Kota Semarang.
2.	Maria Goretty Situmorang, Herbasuki Nurcahyanto, Aumarul Marom (2025). Judul Penelitian: Analisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di	Menganalisis upaya pemberdayaan masyarakat melalui program kampung kerajinan bambu dan rotan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat keberlangsungan dari pemberdayaan tersebut.	Teori utama yang digunakan adalah teori tahapan pemberdayaan masyarakat dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pemberdayaan telah berjalan dengan baik, namun belum maksimal. Tahap penyadaran sudah meningkatkan kesadaran pentingnya pemberdayaan, tahap pengkapasitasan melalui pelatihan berjalan namun masyarakat menginginkan variasi kegiatan yang lebih berdampak, serta tahap pendayaan dengan digital	Persamaannya adalah keduanya menyoroti terkait pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kerajinan lokal sebagai upaya meningkatkan perekonomian kawasan.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus analisis penelitian. Dalam Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan terdapat analisis yang lebih terstruktur menggunakan teori tahapan pemberdayaan (penyadaran, pengkapasitasan, pendayaan), sementara Kampung Batik Rejomulyo lebih memfokuskan pada dinamika dua kelompok pemangku kepentingan

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Nama Jurnal: <i>Journal of Management & Public Policy</i>, Vol. 13, No. 3. Link: https://ejournal3.unidip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/44506				marketing masih terkendala karena kurangnya pemahaman dan pendampingan. Faktor penghambat meliputi komunikasi yang kurang efektif antar pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, disposisi dukungan yang belum optimal, serta struktur birokrasi yang tidak lengkap.		(Dinas Koperasi UMKM dan perajin batik).
3.	Nisa Aulia Marshanda, Tjitjik Rahaju (2024). Judul Penelitian: Pemberdayaan Masyarakat melalui	Menggambarkan proses penguatan wilayah lokal melalui pengolahan eceng gondok sebagai upaya	Menggunakan teori penguatan kawasan oleh Ambar Teguh Sulistiyani (2004) yang membagi pemberdayaan	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan proses pemberdayaan melalui pengolahan eceng gondok dengan dampak positif berupa peningkatan kapasitas	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian menitikberatkan pada pemberdayaan	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada fokus objek penelitiannya. Penelitian ini fokus pada pengelolaan

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pengolahan Eceng Gondok di Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya. Nama Jurnal: Publika, Vol. 12, No. 1. Link: https://ejournal.une-sa.ac.id/index.php/publika/article/view/58630/45944	pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.	menjadi tiga tahap berurutan, yaitu penyadaran dan pembentukan, transformasi pengetahuan, dan peningkatan intelektual.		masyarakat, pengurangan pencemaran sungai, dan manfaat ekonomi dari produk olahan (pelet ikan, kompos). Pemberdayaan dilaksanakan secara bertahap mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat hingga peningkatan intelektual dan kemampuan pengelolaan eceng gondok secara mandiri.	masyarakat sebagai suatu upaya dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas.	eceng gondok sebagai sumber daya lingkungan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada pemberdayaan perajin batik sebagai suatu warisan budaya yang harus dijaga.
4.	Aldinatul Islam, Fitri Eriyanti (2024). Judul Penelitian: Peran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota	Mendesripsikan peran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan IKM serai wangi di Desa	Menggunakan teori peran pemerintah dalam pemberdayaan dengan indikator yang terbagi menjadi tiga, yaitu regulator,	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperindag sudah berjalan melalui fungsi regulator (kebijakan hilirisasi, pelatihan), dinamisator (pembinaan dan sosialisasi), serta fasilitator (akses modal,	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama menyoroti mengenai pemberdayaan industri kecil sebagai kunci dalam peningkatan	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penekanannya. Penelitian ini lebih menekankan peran struktural pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Sawahlunto dalam Pemberdayaan Industri Kecil Masyarakat (IKM) di Desa Balai Batu Sandaran. Nama Jurnal: Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Vol. 5, No. 2. Link: https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/134/137	Balai Batu Sandaran.	dinamisator, dan fasilitator.		promosi, sarana prasarana). Namun peran ini masih terkendala pada keterbatasan anggaran, legalitas produk, rendahnya pelatihan, dan mindset pelaku IKM	kesejahteraan masyarakat.	dalam konteks IKM berbasis komoditas (serai wangi), sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah penurunan jumlah perajin batik.
5.	Ernawati S.K (2023). Judul Penelitian: Analisis Pendekatan Komunikasi	Menganalisis peran lembaga desa dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan	Menggunakan teori komunikasi partisipatif sebagai inti.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga desa berperan krusial sebagai mediator, fasilitator, sekaligus penghubung antara pemerintah, lembaga lain, dan	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keudanya sama-sama menekankan pentingnya	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus analisisnya. Penelitian ini lebih menyoroti mekanisme

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Partisipatif Lembaga Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan. Nama Jurnal: Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan (JERP), Vol. 1, No. 3. Link: https://jurnalprofau.com/index.php/JERP/article/download/19/75	pendekatan komunikasi partisipatif.			masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat mampu meningkatkan rasa memiliki terhadap program dan membuat pelaksanaan lebih efektif serta berkelanjutan.	pemberdayaan berbasis partisipasi.	komunikasi partisipatif di lembaga desa secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menyoroti pada masalah penurunan jumlah perajin batik dan dinamika dua aktor penting yaitu Dinas Koperasi UMKM dan masyarakat (perajin batik).
6.	Oti Kusumaningsih, Emiraldo Win Pazqara, Johar Ma'muri (2023).	Mengkaji secara mendalam bagaimana partisipasi	Menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah, masyarakat kurang aktif dan lebih banyak	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitiannya.

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Judul Penelitian: Partisipasi dan Desentralisasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata. Nama Jurnal: Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 10, No. 2. Link: https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/10120/pdf	masyarakat dan desentralisasi berjalan dalam program pemberdayaan melalui pengembangan desa wisata.	partisipasi dan desentralisasi (Moeljarto, 1966).		sekadar menjadi penikmat hasil program wisata. Desentralisasi juga masih lemah karena sifatnya <i>top-down</i> , hanya mengikuti instruksi pemerintah desa. Pemberdayaan di sana lebih bersifat formal, belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat.	menekankan mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat dan menyoroti bahwa tanpa keterlibatan aktif masyarakat, program tidak akan berjalan maksimal.	Penelitian ini berfokus pada pengembangan desa wisata untuk pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada upaya mengatasi masalah regenerasi perajin batik sekaligus pemberdayaan ekonomi kreatif.

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7.	Bariq Rakhmadian, Lukman Arif (2023). Judul Penelitian: Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa “Ngingas Makmur Abadi” Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Nama Jurnal: <i>Journal Publicuho</i>, Vol. 6, No. 4. Link: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/252/165	Menganalisis proses pemberdayaan masyarakat melalui peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa.	Menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Anthony Bebbington dalam Mardikanto dan Soebianto dengan tiga tahapan, yaitu <i>enabling</i> , <i>empowering</i> , <i>protecting</i> .	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan berjalan cukup baik pada aspek <i>enabling</i> dan <i>empowering</i> , misalnya dengan mendorong inovasi teknologi (mesin pengolah sampah ramah lingkungan) dan memaksimalkan potensi “Kampung Logam”. Namun, aspek <i>protecting</i> masih mengalami kendala, seperti rendahnya disiplin dalam manajemen usaha dan masalah pengelolaan modal. Dampak positifnya terlihat pada meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) serta penguatan ekonomi lokal.	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai strategi penguatan ekonomi lokal.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada fokus penelitiannya dan aktor pemberdayaan. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan berbasis kelembagaan ekonomi desa (BUMDes) dengan sektor unggulan industri logam, sementara penelitian di Kampung Batik Rejomulyo berfokus pada pemberdayaan berbasis budaya dan kerajinan tradisional yang melibatkan dua perspektif, yaitu pemerintah daerah (Dinas Koperasi UMKM) dan perajin batik.

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
8.	Endik Hidayat, Aufa Izzudin Baihaqi, Rustono Farady Marta (2022). Judul Penelitian: Kolaborasi Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 Desa Jelgung Kabupaten Sampang. Nama Jurnal: Jurnal Warta LPM, Vol. 25, No. 2. Link: https://journals2.ums.ac.id/warta/article/download/649/225	Menggambarkan model pemberdayaan masyarakat selama pandemi Covid-19 serta mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat.	Menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Midgley yang menekankan tiga peran, yaitu pemberdayaan oleh individu, komunitas, dan pemerintah.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu padat karya (pelatihan membatik, kerajinan, dan keterampilan) serta padat modal (koperasi, bantuan usaha, BLT, dan BUMDes). Aktor utamanya adalah tokoh masyarakat (seperti pemilik galeri batik lokal) dan pemerintah desa.	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi dan pentingnya aktor eksternal maupun internal.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus masalah dan lingkup wilayah. Penelitian di Desa Jelgung lebih berorientasi pada respon darurat pandemi dengan melibatkan aktor desa, tokoh masyarakat, dan lembaga desa, sedangkan penelitian di Kampung Batik Rejomulyo berorientasi pada keberlanjutan sektor kerajinan batik dengan melibatkan pemerintah daerah (Dinas Koperasi UMKM) dan komunitas perajin.

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9.	Kiki Setyaningsih, Sri Yuliani (2022). Judul Penelitian: <i>Community Governance</i> Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas (Studi Pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM)). Nama Jurnal: Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, Vol. 2, No. 2. Link: https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/download/66549/37498	Mengetahui bagaimana proses pemberdayaan penyandang disabilitas ditinjau dari perspektif <i>community governance</i> .	Menggunakan teori <i>community governance</i> dan teori pemberdayaan masyarakat dengan tahapan penyadaran, pengkapisitasan, dan pendayaan.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan sudah berjalan melalui tiga tahap, dengan berbagai pelatihan (menjahit, kewirausahaan, <i>public speaking</i> , manajemen organisasi, dll.), akan tetapi masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran sebagian anggota untuk berorganisasi dan keterbatasan fasilitas pelatihan.	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya berfokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai kunci keberlangsungan suatu komunitas, sama-sama menekankan pentingnya partisipasi dan tahapan pemberdayaan.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penekanannya. Penelitian ini lebih menekankan pemberdayaan dari sisi komunitas internal, yaitu penyandang disabilitas dengan kerangka <i>community governance</i> , sementara penelitian di Kampung Batik Rejomulyo lebih menekankan pemberdayaan dalam konteks industri batik dengan meninjau hubungan antara pemerintah daerah dan perajin batik sebagai aktor utama.

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
10.	Tiara Khairina Bella, Nina Widowati, Maesaroh (2022). Judul Penelitian: Tahapan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah "Gedawang Asri" Kelurahan Gedawang Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Nama Jurnal: <i>Journal of Management & Public Policy</i>, Vol. 11, No. 2.	Menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi dalam keberhasilan program.	Menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, pendayaan.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum berjalan optimal. Tahap penyadaran masih lemah karena banyak masyarakat belum terlibat. Pada tahap pengkapasitasan belum maksimal karena kurangnya koordinasi dan pelatihan, sementara pada tahap pendayaan belum mampu mendorong masyarakat berwirausaha secara mandiri. Faktor pendorongnya adalah dukungan sarana prasarana dan kerja sama lintas pihak, sedangkan penghambatnya meliputi kurang disiplin, mindset masyarakat yang keliru, dan pandemi Covid-19.	Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya menyoroti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses bertahap yang membutuhkan kesadaran, partisipasi, kapasitas, serta dukungan pihak eksternal.	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus sektor dan pihak yang dilibatkan. Penelitian ini lebih menekankan pada pemberdayaan lingkungan berbasis pengelolaan sampah dengan aktor utamanya, yaitu pengelola bank sampah dan masyarakat. Sementara penelitian di Kampung Batik Rejomulyo lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis batik dengan aktor utamanya, yaitu parajin batik dan Dinas Koperasi UMKM.

No.	Peneliti, Tahun, Judul, dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Link: https://ejournal3.unidip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/33539						

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Denny Febian, Widyawati, Kresna Adhi Prahmana Putra, dan Nihayatus Sholichah membahas mengenai bagaimana program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berperan dalam mengembangkan industri batik dengan melalui tiga fungsi, yaitu fasilitator (penyedia pelatihan, alat produksi, dan prasarana), regulator (menciptakan kebijakan yang mendukung akses pasar dan perizinan), serta katalisator (mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, pendidikan, dan komunitas). Hasil penelitian menunjukkan dampak positif berupa peningkatan kualitas produk batik, kemandirian ekonomi pengrajin, serta pelestarian budaya. Namun, hambatan juga ditemukan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran generasi muda terhadap batik, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam konteks penanganan permasalahan penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo. Pertama, penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya peran pemerintah untuk menghidupkan kembali industri batik, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Kedua, pengalaman Kampung Batik Tin memperlihatkan bahwa pelatihan, bantuan fasilitas, dan promosi pasar mampu memperkuat keberlanjutan batik sehingga relevan untuk dianalisis dari perspektif masyarakat yang mana adalah perajin Kampung Batik Rejomulyo yang kini jumlahnya menurun.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Maria Goretty Situmorang, Herbasuki Nurcahyanto, dan Aufarul Marom membahas bagaimana upaya pemberdayaan

dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Pada tahap penyadaran, masyarakat diberikan pemahaman mengenai potensi lokal dan manfaat pemberdayaan. Pada tahap pengkapasitasan dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, serta dukungan sarana prasarana, meskipun masih ada kendala yang ditemukan, seperti keterbatasan fasilitas dan kejenuhan masyarakat terhadap kegiatan yang dianggap monoton. Sementara itu, pada tahap pendayaan berfokus pada penguatan pemasaran melalui *digital marketing* dan penyediaan galeri produk, namun masih terhambat oleh kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan keterbatasan dukungan. Hambatan utama dalam pelaksanaan pemberdayaan pada penelitian tersebut meliputi kurang efektifnya komunikasi antara pemerintah, perajin, dan koordinator kegiatan. Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya, sikap atau disposisi aparat pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung serta struktur birokrasi yang belum tertata secara optimal. Penelitian tersebut memberikan kontribusi bagi penelitian yang akan dilakukan di Kampung Batik Rejomulyo karena menegaskan bahwa keberhasilan upaya pemberdayaan tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya program, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kesesuaian dukungan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nisa Aulia Marshanda dan Tjitjik Rahaju membahas mengenai bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pemberdayaan untuk mengolah eceng gondok yang semula dianggap limbah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti pelet ikan, kompos, dan kerajinan. Pada penelitian ini proses pemberdayaan dilakukan dengan melalui tiga tahapan menurut

Ambar Teguh Sulistyani, yaitu tahap penyadaran (masyarakat diberi pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan potensi lokal), tahap transformasi pengetahuan (pelatihan teknis dalam pengolahan eceng gondok), dan tahap peningkatan intelektual (masyarakat mandiri dalam menghasilkan produk, membentuk kelompok, dan memperoleh tambahan penghasilan). Temuan penelitian ini tidak hanya berpengaruh terhadap aspek perekonomian, akan tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran sosial serta upaya pelestarian lingkungan. Hasil dari penelitian ini memiliki relevansi dan nilai guna sebagai rujukan bagi penelitian yang akan dilaksanakan di Kampung Batik Rejomulyo. Dari sisi Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, penelitian ini memberi contoh bagaimana pemerintah berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya memberikan pelatihan, akan tetapi juga membangun kesadaran kolektif serta membina kemandirian masyarakat. Sementara itu, dari sisi masyarakat (perajin batik), penelitian ini menginspirasi bagaimana kesadaran, keterampilan, dan kemandirian dapat ditumbuhkan melalui tahapan pemberdayaan yang jelas sehingga perajin batik tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mengelola potensi lokalnya agar tetap bertahan dan berkembang.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Aldinatul Islam dan Fitri Eriyanti menyoroti peran instansi daerah, terutama melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, dalam melaksanakan peran strategis untuk menjaga keberlanjutan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dijalankan dalam tiga bentuk utama, yaitu sebagai regulator melalui perumusan kebijakan dan

pelaksanaan kegiatan pelatihan, sebagai dinamisator dengan menyelenggarakan pembinaan serta pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan memperluas akses pasar, serta sebagai fasilitator dengan memberikan dukungan berupa kemudahan permodalan, penyediaan sarana dan prasarana, serta promosi produk melalui pameran maupun kegiatan tertentu. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses permodalan, minimnya kerja sama dengan pihak eksternal, belum adanya legalitas produk, terbatasnya pelaksanaan pelatihan secara berkelanjutan, serta pola pikir industri kecil menengah yang masih konvensional. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penelitian yang akan dilakukan dalam upaya menanggulangi penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo karena dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat di sektor kreatif, baik industri batik maupun jenis industri kecil menengah lainnya menuntut adanya kerja sama yang solid, dukungan fasilitas yang memadai, serta perubahan cara pandang masyarakat agar sasaran pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Ernawati S.K. membahas peran strategis lembaga desa dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan komunikasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan komunikasi partisipatif mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pemberdayaan. Partisipasi tersebut menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap program, meningkatkan efektivitas pelaksanaan, dan memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan lokal. Pada konteks ini, lembaga desa berperan sebagai fasilitator, mediator, dan

penghubung antara masyarakat, pemerintah, serta pihak terkait lainnya. Namun penelitian ini juga menyoroti adanya tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan akses informasi di lembaga desa. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penelitian yang akan dilakukan di Kampung Batik Rejomulyo karena memberikan gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan program formal, tetapi perlu melibatkan masyarakat secara aktif melalui komunikasi partisipatif. Ditinjau dari sisi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam memperkuat pola komunikasi yang melibatkan perajin batik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi program sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Sementara itu, dari perspektif masyarakat, khususnya perajin batik, penelitian ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dalam kegiatan pemberdayaan agar perajin memiliki rasa kepemilikan terhadap program, meningkatkan semangat kerja, serta memperkuat solidaritas antar perajin.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Oti Kusumaningsih, Emiraldo Win Pazqara, dan Johar Ma'muri membahas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Kateter, Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program tersebut masih relatif rendah disebabkan oleh dominasi aparat desa atau pengelola program dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Pada kondisi tersebut, masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima manfaat dan belum sepenuhnya menjadi subjek utama dalam kegiatan pemberdayaan. Sementara itu, penerapan prinsip desentralisasi belum berjalan secara maksimal karena model

pemberdayaan yang digunakan masih bersifat sentralistik atau *top-down*, yaitu bergantung pada arahan pemerintah desa. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian yang akan dilakukan mengenai proses pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi penurunan jumlah perajin batik, karena menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat serta pendelegasian kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Dari sisi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, penelitian ini bisa menjadi pembelajaran bahwa program pembinaan perajin batik tidak boleh hanya berbentuk instruksi formal, tetapi harus mendorong keterlibatan langsung perajin dalam perencanaan hingga pelaksanaan. Sementara dari sisi masyarakat (perajin batik), penelitian ini memberi pesan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh inisiatif dan keterlibatan aktif mereka, bukan hanya menunggu bantuan dari pemerintah.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Bariq Rakhmadian dan Lukman Arif menjelaskan mengenai bagaimana proses pemberdayaan berjalan dengan melalui tiga tahapan, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap *enabling*, BUMDes berupaya membuka potensi lokal dan menciptakan iklim yang mendukung masyarakat untuk berkembang. Pada tahap *empowering* diwujudkan dengan peningkatan keterampilan, inovasi, dan akses peluang usaha agar masyarakat mampu mandiri dan bersaing. Sedangkan pada tahap *protecting* ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kelompok yang masih lemah melalui pendampingan, pelatihan, dan dukungan modal, meskipun tahap ini masih menghadapi beberapa kendala. Kontribusi utama BUMDes adalah peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta penguatan

ekonomi lokal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penelitian yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah penurunan jumlah perajin batik di Kampung Batik Rejomulyo karena memberikan contoh praktik nyata terkait pemberdayaan masyarakat yang bisa dijadikan acuan untuk mengelola pemberdayaan perajin batik di Kampung Batik Rejomulyo, baik melalui aspek pengembangan potensi, peningkatan kapasitas, maupun perlindungan terhadap usaha kecil agar tetap berkelanjutan.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Endik Hidayat, Aufa Izzudin Baihaqi, dan Rustono Farady Marta menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat tidak dapat dijalankan secara sepihak, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama antara aktor individu, seperti tokoh masyarakat, perajin batik, serta inisiatif personal, dan aktor pemerintah, yang mencakup pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta berbagai program bantuan dari pemerintah daerah. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan diwujudkan dalam dua bentuk utama, yakni kegiatan padat karya, seperti pelatihan membatik dan pengembangan keterampilan lainnya, serta kegiatan padat modal, berupa dukungan permodalan bagi usaha kecil dan koperasi simpan pinjam. Secara substansial, masyarakat diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas keterampilan sekaligus memperoleh akses terhadap sumber permodalan agar mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi. Temuan ini memberikan kontribusi bagi penelitian yang akan dilakukan mengenai proses pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi penurunan jumlah perajin batik, karena memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberdayaan dapat terwujud apabila

terdapat keterpaduan peran antara pemerintah dan masyarakat. Dari sisi Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, temuan ini menegaskan pentingnya dukungan dalam bentuk pelatihan, bantuan modal, dan fasilitasi kelembagaan agar perajin batik tetap bertahan. Selain itu, dari sisi masyarakat (perajin batik), penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas, keterampilan, serta inisiatif lokal sangat penting untuk menghidupkan kembali produktivitas.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Kiki Setiyaningsih dan Sri Yuliani membahas mengenai bagaimana komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) melaksanakan pemberdayaan melalui tahapan penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan. Pemberdayaan ini dikaji melalui perspektif *community governance*, yaitu tata kelola komunitas berbasis modal sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Difabel Blora Mustika (DBM) mampu menjadi aktor penting dalam mengurangi stigma, meningkatkan keterampilan, serta membangun kemandirian, meskipun masih ada kendala seperti keterbatasan pelatihan *hard skill* dan rendahnya kesadaran sebagian anggota akan pentingnya berorganisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penelitian yang akan dilakukan mengenai proses pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah penurunan jumlah perajin batik karena dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana peran komunitas dan modal sosial dapat memperkuat proses pemberdayaan. Dari sisi Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, penelitian ini memberi gambaran bahwa dukungan program, pelatihan, dan kolaborasi lintas pihak sangat penting dalam menjaga keberlanjutan perajin batik. Sementara itu, dari sisi masyarakat (perajin batik), penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran, partisipasi, dan penguatan

jaringan sosial agar perajin tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang secara mandiri.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Tiara Khairina Bella, Nina Widowati, dan Maesaroh membahas bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyadaran belum maksimal karena sosialisasi masih kurang, partisipasi masyarakat dalam musyawarah rendah, serta tidak adanya sistem *reward* dan *punishment*. Pada tahap pengkapasitasan, pelatihan sudah diberikan, seperti pengolahan sampah menjadi produk daur ulang, namun koordinasi antar pengurus dan masyarakat masih lemah serta pelatihan khusus untuk pengelola kurang. Sementara pada tahap pendayaan, meskipun ada peluang usaha dari produk daur ulang, masyarakat belum mampu berwirausaha mandiri dan manfaat ekonomi masih terbatas, meski ada perubahan positif dalam perilaku menjaga lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penelitian yang akan dilakukan mengenai proses pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah penurunan jumlah perajin batik karena memberikan gambaran bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat dapat dianalisis secara sistematis, mulai dari penyadaran, peningkatan kapasitas, hingga pendayaan. Dari sudut pandang Dinas Koperasi UMKM, hasil ini menunjukkan pentingnya pendampingan, pelatihan berkelanjutan, serta dukungan sarana untuk menjaga keberlangsungan usaha perajin batik. Sementara itu, dari sisi masyarakat (perajin batik), penelitian ini memberi pelajaran bahwa perubahan perilaku, kedisiplinan,

dan kesadaran kolektif merupakan kunci agar pemberdayaan benar-benar berdampak, baik secara ekonomi maupun keberlanjutan usaha.

Berdasarkan kajian dari berbagai penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak semata-mata ditentukan pada program yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh tingkat keterlibatan masyarakat secara aktif. Kesenjangan penelitian yang ada terletak pada masih terbatasnya kajian yang melihat pemberdayaan dari dua sisi secara bersamaan, yaitu perajin batik sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat, serta aktor kelembagaan yang berperan dalam perumusan kebijakan dan fasilitasi program dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta Dinas Perindustrian Kota Semarang. Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam konteks penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang secara kolaboratif. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat secara umum atau aspek ekonomi kreatif semata, studi ini menitikberatkan pada keterlibatan dan kerja sama antara masyarakat dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai aktor kelembagaan. Penekanan pada regenerasi perajin batik menjadikan studi ini penting karena membahas pelestarian warisan budaya sekaligus penguatan ekonomi lokal melalui proses pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dan dukungan dari pemerintah.

1.6.2 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari penyelenggaraan negara serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pada praktiknya, administrasi publik mencakup pengelolaan organisasi publik, perumusan dan implementasi kebijakan publik, manajemen publik, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Bidang kajian ini termasuk dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial. Secara umum, administrasi publik meliputi serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perhatian utama dalam kajian administrasi publik diarahkan pada manusia sebagai pelaku utama dalam pembangunan dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Administrasi publik dapat dipahami sebagai keseluruhan aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah, terutama lembaga eksekutif, dalam menangani beragam permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat (Nigro dan Nigro, 1984: 3–4). Ruang lingkup kajian administrasi publik meliputi birokrasi, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, serta pengimplementasian prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Seiring dengan perkembangannya, kajian administrasi publik juga mencakup aspek kepublikan (*publicness*) yang dikenal sebagai nilai publik (*public value*). Sejalan dengan perkembangan keilmuan, ruang lingkup kajian administrasi publik juga mencakup aspek kepublikan (*publicness*) yang dipahami sebagai nilai publik (*public value*). Administrasi publik berlandaskan pada prinsip-prinsip manajemen

dan terus mengalami penyesuaian sesuai dengan dinamika zaman. Beberapa pakar menyatakan bahwa administrasi publik berfungsi mengatur organisasi serta manajemen pemerintahan dalam menjalankan kewenangan politik, termasuk dalam proses penetapan kebijakan publik.

Kajian mengenai administrasi publik dipandang sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk memahami prinsip-prinsip umum terkait struktur dan peranannya, sekaligus memprediksi arah perkembangannya. Pihak yang memegang peran sentral dalam pelaksanaan administrasi publik adalah pejabat publik yang memperoleh mandat untuk menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik memiliki kewajiban dalam mengelola kepentingan umum, termasuk juga isu-isu strategis, seperti responsivitas, keterwakilan, keadilan, dan aspek lain yang berkaitan dengan pelayanan publik. Bidang administrasi publik bersifat dinamis karena terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Paradigma administrasi publik berfungsi sebagai landasan berpikir yang menggambarkan pandangan dasar mengenai bagaimana penyelenggaraan administrasi publik seharusnya dilaksanakan. Seiring berjalannya waktu, paradigma tersebut mengalami pergeseran agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan yang terus berkembang dalam praktik administrasi publik.

Berikut ini terdapat 6 perubahan paradigma dalam administrasi publik, diantaranya adalah:

Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Tokoh yang mewakili paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White yang berpendapat bahwa administrasi negara seharusnya berfokus pada birokrasi pemerintahan. Paradigma ini menunjukkan adanya pengaruh dan dominasi politik yang kuat terhadap lembaga pemerintahan dan praktik administrasi publik. Kondisi tersebut menggambarkan situasi ketika kekuasaan politik memiliki peran yang sangat besar dalam mengendalikan jalannya pemerintahan, sebagaimana yang sering terjadi pada sistem pemerintahan otoriter atau diktator, sehingga seluruh aspek administrasi publik berada di bawah kendali politik. Keadaan demikian dipandang berdampak negatif terhadap demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta kesejahteraan masyarakat secara umum.

Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma prinsip-prinsip administrasi merujuk pada sekumpulan asas yang pertama kali dirumuskan oleh Luther Gulick dan Lyndall Urwick dalam karya mereka berjudul "*Notes on the Theory of Organization*". Asas-asas tersebut disusun sebagai pedoman dalam mengelola organisasi serta menyelenggarakan administrasi publik secara sistematis. Pada paradigma ini dikemukakan konsep POSDCORB sebagai kerangka fungsi-fungsi manajemen, yang mencakup kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan sumber daya manusia (*staffing*), pemberian arahan (*directing*), koordinasi (*coordinating*), penyusunan laporan (*reporting*), dan pengelolaan anggaran (*budgeting*). Konsep POSDCORB digunakan untuk menjelaskan ruang lingkup tugas pimpinan dalam menjalankan

organisasi secara terpadu. Pada periode ini sebagaimana dikemukakan oleh (Anwaruddin, 2004), administrasi publik dipandang sebagai bidang ilmu yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai sistem pemerintahan. Penerapannya tidak dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang budaya, jenis fungsi, kondisi lingkungan, tujuan organisasi, maupun bentuk kelembagaan (Anwaruddin, 2004). Prinsip-prinsip tersebut dianggap sebagai elemen dasar yang memperkuat posisi administrasi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik Ilmu Pengetahuan (1950-1970)

Herbert Simon melalui karyanya berjudul "*The Proverbs of Administration*" mengemukakan bahwa prinsip manajemen ilmiah POSDCORB belum dapat menjelaskan secara komprehensif arti unsur "publik" dalam administrasi publik. Simon menilai bahwa konsep POSDCORB tidak menguraikan secara tegas tugas dan peran yang seharusnya dijalankan oleh administrator publik, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan. Kritik tersebut selanjutnya memicu kembali diskursus mengenai hubungan antara administrasi dan politik. Pada fase paradigma ini, dilakukan upaya untuk merumuskan ulang keterkaitan konseptual antara administrasi dan ilmu politik, sehingga administrasi kembali ditempatkan dalam kerangka disiplin induknya, yaitu ilmu politik. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran lokus kajian menuju birokrasi pemerintahan. Namun, konsekuensi dari langkah ini adalah perlunya mendefinisikan kembali bidang administrasi publik berdasarkan fokus keahlian utamanya. Kondisi ini membawa

perubahan dalam cara administrasi publik dipahami, diajarkan, dan dipraktikkan. Peralihan menuju pendekatan yang lebih ilmiah, disertai penekanan pada pengembangan teori serta penelitian terapan, turut mendorong peningkatan mutu pelayanan publik dan efektivitas organisasi sektor publik. Paradigma ini hingga kini masih memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek dalam penyelenggaraan administrasi publik

Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma keempat disebut sebagai *Administrative Science*. Paradigma ini dirumuskan untuk memperjelas ruang lingkup dan arah kajian administrasi dengan penekanan pada teori organisasi dan ilmu manajemen. Pada periode ini, kajian administrasi lebih difokuskan pada aspek substansi pembahasan, sementara aspek lokus kajian tidak lagi menjadi perhatian utama. Selain itu, paradigma ini mengembangkan berbagai pendekatan serta teknik yang memerlukan keahlian khusus dan tingkat spesialisasi tertentu. Seiring dengan perkembangannya, paradigma ini menghadapi sejumlah persoalan, salah satunya adalah pertanyaan mengenai apakah administrasi publik masih memiliki legitimasi untuk membahas aspek “publik” atau negara apabila hanya menempatkan ilmu administrasi sebagai fokus utama kajian. Selain itu, ilmu administrasi tidak lagi mengacu pada prinsip-prinsip yang bersifat umum, karena perhatian kajiannya kini telah berpindah pada prinsip-prinsip organisasi dan manajemen yang lebih spesifik dan terperinci.

Paradigma keempat muncul sebagai bentuk respon terhadap pandangan dunia ketiga yang menempatkan manajemen publik kembali pada disiplin

induknya. Pada konteks ini, administrasi publik dipandang sebagai pelopor dalam pengembangan berbagai teori politik sehingga mendorong para pemiki administrasi publik untuk mencari pendekatan alternatif yang berbeda. Istilah ilmu manajerial dalam paradigma ini dicirikan sebagai seluruh kajian mengenai hipotesis hierarkis dan ilmu eksekutif yang bertujuan memperjelas motif serta sasaran di balik upaya peningkatan kapasitas dan efektivitas program secara lebih terarah.

Pada fase perkembangan ini, konsep-konsep manajemen dirumuskan secara lebih sistematis dan dianalisis secara lebih komprehensif, mencakup kajian tentang perilaku dalam organisasi, telaah manajerial, serta penerapan kemajuan teknologi. Pada masa yang sama, administrasi publik berkembang melalui dua arah pemikiran utama, yaitu pendekatan yang menempatkan administrasi sebagai disiplin ilmu mandiri yang dipengaruhi oleh psikologi sosial, serta pendekatan yang memusatkan perhatian pada kajian kebijakan publik (*public policy*). Seiring dengan perkembangan pemikiran pada era 1960-an, Keith M. Henderson menegaskan bahwa teori organisasi perlu dijadikan fokus utama dalam studi administrasi negara. Pandangan tersebut kemudian melahirkan pengembangan *Organizational Development* (OD) atau pengembangan organisasi sebagai salah satu bidang keahlian yang tumbuh pesat dalam ilmu administrasi. Tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam periode ini antara lain Keith M. Anderson, James G. Walk, James G. March, Herbert Simon, Richard Cyert, dan James D. Thompson.

Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1970)

Paradigma kelima muncul dan berkembang sejak tahun 1970 dengan menegaskan administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang otonom. Pada fase ini, pembahasan administrasi tidak lagi semata-mata berfokus pada ilmu administrasi murni, tetapi lebih menitikberatkan pada pengembangan teori organisasi. Penekanan tersebut mencakup kajian mengenai cara organisasi beroperasi, penyebab organisasi dapat berfungsi secara efektif, kedudukan individu dalam sistem organisasi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlangsung di dalam organisasi. Selain itu, penerapan teknik-teknik manajemen dalam konteks pemerintahan menjadi salah satu fokus penting pada tahap ini. Perkembangan selanjutnya mendorong munculnya kajian mengenai ilmu kebijakan (*policy science*) dan politik ekonomi. Aspek-aspek seperti perumusan kebijakan pemerintah, analisis kebijakan, serta metode pengukuran hasil kebijakan turut menjadi perhatian utama. Seluruh aspek tersebut dianggap sebagai rangkaian yang mampu mengaitkan fokus kajian administrasi publik dengan lokusnya. Sejalan dengan tren dalam paradigma ini, perhatian utama administrasi publik difokuskan pada teori organisasi dan manajemen yang telah berkembang lebih maju.

Pada paradigma ini, lokus normatif administrasi publik diarahkan pada birokrasi pemerintahan serta isu-isu kemasyarakatan (*public affairs*). Walaupun bidang *public affairs* masih dalam tahap pengembangan bentuknya, seiring waktu kajian ini mulai memperoleh posisi strategis dan menarik perhatian dalam studi administrasi publik. Administrasi publik sebagai bidang ilmu telah menunjukkan ciri khas tersendiri dalam kurun waktu yang relatif singkat, yang ditandai dengan munculnya berbagai departemen, fakultas, dan lembaga akademik baru yang secara

husus mengkaji administrasi publik dan *public affairs*. Kondisi ini menunjukkan adanya sikap dan arah yang jelas dari paradigma tersebut. Seiring dengan perkembangan paradigma sebagaimana telah diuraikan (Gerald E. Caiden, 1982) dalam (Keban, 2019) yang merinci bahwa ada beberapa aliran dalam administrasi publik, yaitu aliran proses administratif, aliran empiris, aliran perilaku manusia, aliran analisis birokrasi, aliran sistem sosial, aliran pengambilan keputusan, aliran matematik, dan aliran integratif. Caiden membagi aliran tersebut menjadi dua kelompok, yaitu aliran proses administrasi yang meliputi aliran empiris, pengambilan keputusan, matematik, dan yang lainnya tergolong ke dalam aliran sistem administrasi yang holistik.

Paradigma 6: Administrasi Publik sebagai *Governance* (1990)

Pada paradigma keenam ditegaskan bahwa sebelum memasuki era *governance*, seluruh paradigma sebelumnya masih didominasi oleh orientasi pada *government* (Henry, 2017). Fokus kajian administrasi publik pada masa tersebut hanya diarahkan pada sektor pemerintahan, sementara kontribusi sektor swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan belum memperoleh perhatian yang memadai. Paradigma ini kemudian mendorong terjadinya pergeseran cara pandang, yaitu dari penyelenggaraan urusan kenegaraan yang semata-mata bergantung pada pemerintah dalam mengelola urusan publik (*governance*). Istilah *from government to governance* kini semakin luas digunakan dan bahkan dipandang sebagai kerangka teoritis yang relevan dalam menjawab berbagai permasalahan publik. Keyakinan yang berkembang di kalangan akademisi maupun

praktisi administrasi publik di berbagai negara memperkuat pandangan Henry untuk menempatkan *governance* bukan sekadar sebagai sudut pandang, melainkan sebagai sebuah paradigma tersendiri.

Penelitian ini menggunakan paradigma administrasi publik paradigma ke-6 yang memandang administrasi publik sebagai *governance*, yang menekankan kolaborasi berbagai aktor dalam penyelesaian masalah publik. Dalam konteks penelitian ini, paradigma *governance* dipilih karena masalah penurunan jumlah perajin batik tidak dapat diatasi oleh pemerintah atau masyarakat secara sepihak. Pendekatan pemberdayaan digunakan sebagai cara untuk menguatkan kapasitas masyarakat melalui kolaborasi aktif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Paradigma ini menekankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, bahkan sektor swasta dalam mengatasi masalah penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang.

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan cabang ilmu yang membahas cara organisasi sektor publik atau pemerintah mengelola berbagai sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan publik secara optimal. Kajian ini menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan, penyediaan layanan kepada masyarakat, pengelolaan anggaran, serta proses pengambilan keputusan di berbagai sektor kehidupan sosial. Menurut J. Steven Ott, Albert C Hyde, dan Jay M Shafritz (1991) dalam (Widowati, 2021) dipahami sebagai suatu profesi yang dijalankan oleh manajer publik sebagai pelaku utama dalam bidang tersebut. Pandangan ini

menekankan bahwa manajemen publik lebih berorientasi pada pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di dalam organisasi pemerintah maupun organisasi non-profit dibandingkan pada pola hubungan dan interaksi dengan lembaga legislatif, lembaga peradilan, maupun institusi sektor publik lainnya. Adapun menurut Nor Ghofur (2014) dalam (Widowati, 2021) menjelaskan bahwa manajemen publik identik dengan manajemen pemerintahan yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Seiring dengan dinamika lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi, teori manajemen publik terus mengalami penyesuaian sesuai dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat saat ini.

Simon dikenal dengan teorinya tentang pengambilan keputusan administratif dalam bukunya *Administrative Behavior*, Simon menolak gagasan bahwa manusia bertindak secara rasional penuh dalam pengambilan keputusan. Simon memperkenalkan konsep *bounded rationality*, yang menjelaskan bahwa dalam situasi yang kompleks, para pembuat keputusan memiliki keterbatasan dalam hal informasi dan kemampuan memprosesnya. Oleh karena itu, manajemen publik harus mempertimbangkan bagaimana cara meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintah. Konsep *New Public Management* (NPM), yang dipelopori oleh Christopher Hood, menekankan perlunya sektor publik menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang berasal dari sektor swasta, seperti akuntabilitas, efisiensi, dan orientasi hasil. *New Public Management* (NPM) berusaha untuk membuat organisasi publik lebih responsif

terhadap kebutuhan masyarakat melalui deregulasi, desentralisasi, dan peningkatan persaingan dalam penyediaan layanan publik.

Secara umum, manajemen publik tidak hanya memiliki keterkaitan dengan pengelolaan organisasi pemerintah, akan tetapi juga berorientasi pada pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, mengelola sumber daya secara profesional, dan menghasilkan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan publik. Pada konteks penelitian ini, manajemen publik dipahami sebagai proses pengelolaan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pendampingan, sedangkan masyarakat, khususnya perajin batik berperan dalam mengimplementasikan program pemberdayaan agar selaras dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Maka dari itu, manajemen publik dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bahwa keberhasilan strategi pemerintah sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat.

1.6.4 Teori Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Chambers (1995) dalam penelitian (Alam, 2025) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kapasitasnya secara mandiri melalui pemberian akses terhadap informasi, kegiatan pelatihan, serta keikutsertaan dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga, pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, dan

keterampilan yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan. Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengenali, mengelola, serta memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu mencapai kemandirian. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) dalam penelitian (Simabur, 2023) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu penyadaran, pengembangan kapasitas, dan pendayaan.

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat mengenai potensi dan peran yang mereka miliki dalam pembangunan. Tahap penyadaran menekankan pada proses membangunkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki potensi dan kekuatan untuk memperbaiki kehidupan. Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Pada tahap ini, pemberdayaan difokuskan pada penguatan kemampuan masyarakat, baik melalui pelatihan, pendidikan, pendampingan, maupun penyediaan sarana pendukung. Pengkapasitasan memberikan masyarakat keterampilan praktis sekaligus kepercayaan diri untuk mengelola potensi yang dimiliki. Tahap pendayaan merupakan proses pemanfaatan kemampuan yang telah dimiliki masyarakat untuk menghasilkan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan. Pada tahap ini, masyarakat diharapkan dapat mengaplikasikan keterampilan dan kapasitas yang telah diperoleh secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan usaha.

Teori pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya telah dijelaskan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menekankan pada tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahapan tersebut memberikan kerangka yang jelas mengenai bagaimana masyarakat dapat berkembang secara mandiri dengan dukungan pihak eksternal. Pada konteks UMKM, pendekatan ini menjadi relevan karena UMKM sering dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber daya. Dengan begitu, teori pemberdayaan masyarakat dapat memberikan landasan awal yang dapat diturunkan pada konsep pemberdayaan UMKM secara lebih spesifik.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperkuat eksistensi usaha perseorangan maupun badan usaha yang termasuk dalam kategori usaha kecil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pemberdayaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan sumber daya secara optimal, sehingga kapasitas dan kemampuan usaha dalam mengelola potensi yang dimiliki dapat semakin berkembang (Adi Fahrudin, 2012:16) dalam penelitian (Desika Karinayah, 2018). Menurut Suharto (2004) dalam (Yulita, 2020) mengemukakan bahwa pemberdayaan mempunyai empat dimensi utama yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian, yaitu kekuatan (*empowering*), melindungi (*protecting*), dukungan (*supporting*), dan pengembangan (*fostering*). Berbagai dimensi tersebut berguna untuk menjelaskan proses pemberdayaan UMKM. Keempat dimensi ini menekankan bahwa pemberdayaan tidak cukup hanya dengan memberikan akses terhadap sumber daya, akan tetapi juga perlu

melindungi kelompok lemah dari persaingan yang tidak seimbang. Selain itu, pemberdayaan harus menumbuhkan dukungan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan kondusif bagi pengembangan usaha. Oleh karena itu, teori ini menjadi pelengkap dari teori pemberdayaan masyarakat sebelumnya dengan menekankan pada aspek operasional pemberdayaan UMKM.

Dimensi pertama adalah *empowering* atau kekuatan, yang menekankan pada upaya penguatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri anggota masyarakat agar mampu mengelola sendiri potensi yang dimiliki. Pada konteks industri rumahan batik, pemberdayaan melalui penguatan dilakukan dengan memberikan pelatihan intensif tentang proses pembuatan dan pemasaran batik kepada anggota baru maupun yang sudah bergabung. Pelatihan ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga anggota merasa mampu dan percaya diri menjalankan usaha batik secara mandiri. Proses pembekalan dan pengarahan yang dilakukan oleh anggota senior berperan penting sebagai fasilitator bagi anggota baru dalam mengasah kemampuan praktis mereka.

Dimensi kedua *protecting* atau melindungi, bertujuan menjaga kelompok rentan agar tidak tertekan oleh persaingan yang tidak seimbang maupun oleh dinamika pasar yang keras. Pada industri rumahan batik, bentuk perlindungan diberikan melalui penyediaan modal usaha yang memadai. Bantuan modal tersebut tidak hanya menjadi dukungan keuangan, akan tetapi juga menjadi jaminan bahwa anggota tidak terpuruk akibat keterbatasan modal sehingga mereka dapat terus

berproduksi tanpa tekanan ekonomi yang berat. Selain itu, pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan berfungsi sebagai perlindungan pengetahuan agar anggota tidak tersisih oleh persaingan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar.

Dimensi ketiga adalah *supporting* atau dukungan, yang mencakup bimbingan, pembinaan, dan fasilitasi yang berkelanjutan agar masyarakat dapat menjalankan perannya secara optimal. Pada industri rumahan batik, dukungan tersebut tampak melalui kegiatan pembinaan rutin, pelatihan tambahan, dan bimbingan pemasaran yang dilakukan secara terstruktur. Selain itu, fasilitasi juga berperan sebagai dukungan yang membantu perajin dalam aktivitas membatik. Pemberian fasilitasi produksi dapat menjadi dorongan bagi perajin agar tetap semangat dalam menjalankan usaha batik. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan, anggota merasa diperhatikan dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sekaligus mempererat hubungan kolektif antar perajin batik.

Dimensi keempat adalah *fostering* atau pengembangan, bertujuan menciptakan kondisi atau iklim yang kondusif untuk pertumbuhan dan keseimbangan distribusi kekuasaan antar kelompok dalam masyarakat. Pada pelaksanaannya, industri rumahan batik melaksanakan kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara periodik yang tidak hanya berfungsi untuk mengawasi proses produksi, tetapi juga untuk memastikan adanya keseimbangan dalam pembagian peran serta akses di dalam komunitas. Hal ini menciptakan tata kelola yang sehat sehingga setiap anggota mampu berkembang dan berinovasi

tanpa merasa terpinggirkan. Pengawasan yang dilakukan secara berkala juga memungkinkan penyesuaian program sesuai kebutuhan nyata anggota sehingga pemberdayaan lebih efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh bagaimana keempat dimensi tersebut saling melengkapi. *Empowering* memastikan kapasitas individu meningkat, *protecting* menjamin keberlanjutan usaha, *supporting* memberikan fondasi yang memadai, dan *fostering* memastikan adanya lingkungan usaha yang kondusif. Pada kerangka penelitian ini, keempat dimensi tersebut menjadi acuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang dalam mengatasi masalah penurunan jumlah perajin batik.

1.6.5 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan UMKM

Upaya pemberdayaan UMKM dipengaruhi oleh keberadaan faktor pendukung dan penghambat terhadap tingkat keberhasilan program. Dukungan yang diberikan kepada pelaku UMKM pada umumnya mencakup fasilitasi akses permodalan, pelaksanaan kegiatan pelatihan, pengembangan jaringan pemasaran, serta peningkatan mutu produk sebagai unsur utama dalam memperkuat kemandirian usaha. Adanya faktor-faktor pendukung tersebut menjadi pijakan yang penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya, baik di pasar nasional maupun global. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak semata-mata berperan dalam menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga

menjadi pendorong utama bagi terlaksananya proses pemberdayaan secara berkelanjutan.

Selain itu, terdapat pula faktor penghambat yang dapat memperlambat proses pemberdayaan UMKM. Menurut Sudaryanto dan Hanim (2002) dalam (Putri et al., 2022) mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki UKM, antara lain keterbatasan modal kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Hambatan ini seringkali muncul karena pelaku UMKM berada pada skala usaha kecil dengan kemampuan finansial dan teknis yang terbatas. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor yang membuat UMKM sulit bersaing di era digital. Pada konteks administrasi publik, hambatan-hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan UMKM dengan kebijakan atau fasilitas yang tersedia dari pemerintah. Oleh karena itu, identifikasi faktor penghambat menjadi langkah krusial agar program pemberdayaan dapat dirancang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Denny Febian dkk. (2024) meneliti terkait pemberdayaan masyarakat di Kampung Batik Tin Surabaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah berupa pelatihan, bantuan fasilitas, dan kebijakan pasar menjadi faktor pendukung yang efektif dalam meningkatkan kualitas produk batik, kemandirian ekonomi pengrajin, serta pelestarian budaya lokal. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya sejumlah kendala, antara lain keterbatasan alokasi dana, rendahnya ketertarikan generasi muda untuk melanjutkan usaha batik, serta belum optimalnya

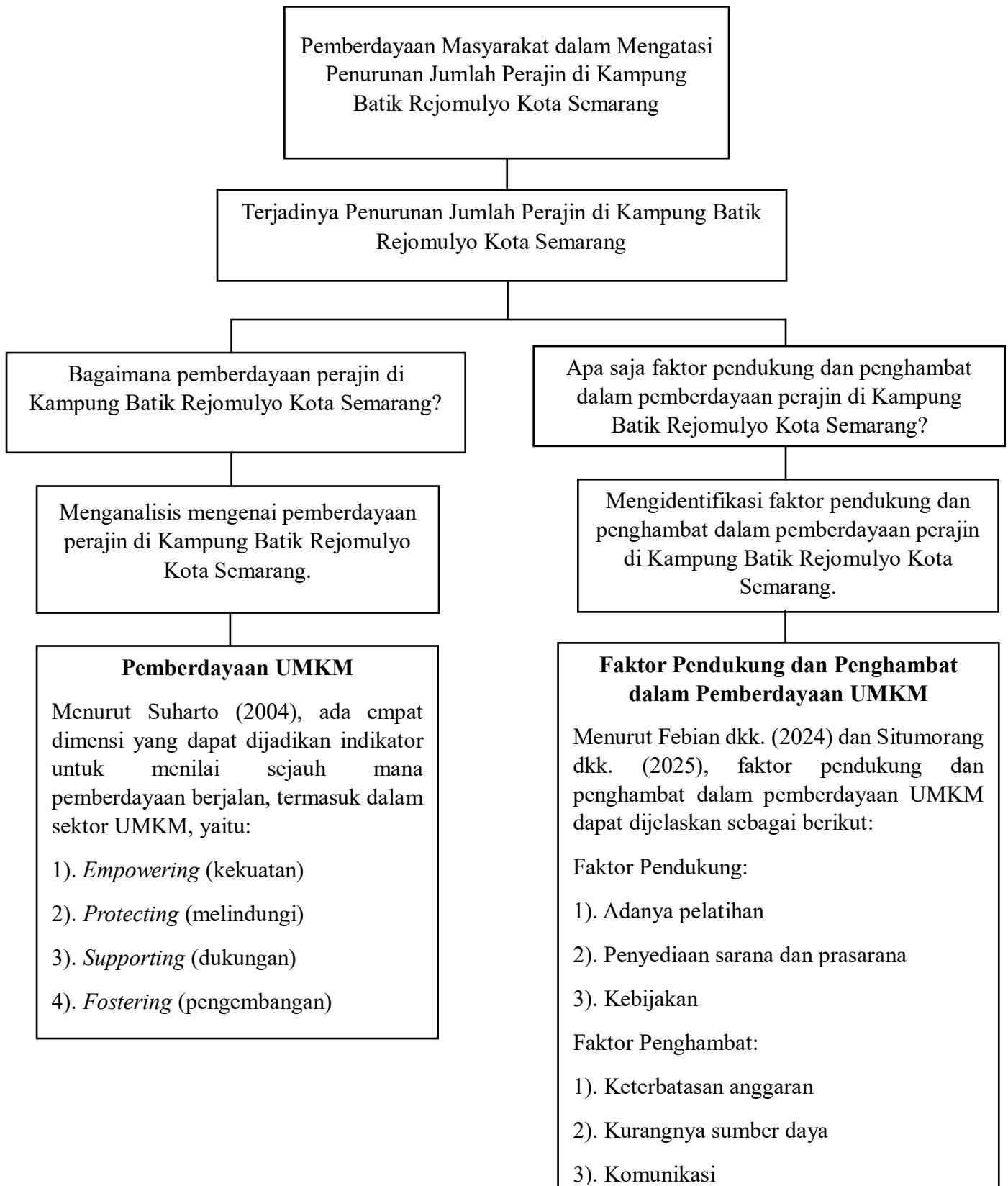
koordinasi antar pemangku kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa dukungan pemerintah dan kolaborasi multiaktor sangat diperlukan, tetapi hambatan struktural dan regenerasi SDM masih menjadi kendala utama.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Maria Goretty Situmorang, Herbasuki Nurcahyanto, dan Aufarul Marom (2025) terkait program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di Semarang juga memberikan gambaran yang relevan. Faktor pendukung yang ditemukan adalah adanya tahapan pemberdayaan yang berjalan dengan baik, khususnya dalam bentuk penyadaran masyarakat tentang potensi lokal dan pelatihan keterampilan yang disediakan pemerintah. Namun, ditemukan faktor penghambat yang muncul, yaitu komunikasi yang kurang efektif antar pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas penunjang, disposisi pemerintah yang belum optimal, serta struktur birokrasi yang tidak lengkap. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak cukup hanya dengan menyediakan program, melainkan perlu didukung oleh koordinasi, kualitas sumber daya, dan tata kelola birokrasi yang efektif.

Berdasarkan sintesis temuan dari kedua penelitian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa faktor yang berperan sebagai pendukung dalam pemberdayaan UMKM tercermin dari adanya dukungan pemerintah, baik melalui penyelenggaraan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, maupun kebijakan yang mempermudah akses pasar. Sementara itu, faktor yang berperan sebagai penghambat dalam pemberdayaan UMKM umumnya berkaitan dengan

keterbatasan anggaran, minimnya regenerasi atau rendahnya minat generasi muda, serta permasalahan komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan temuan dari Febian dkk. (2024) serta Situmorang dkk. (2025) sebagai rujukan dalam menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan UMKM, khususnya dalam konteks penurunan jumlah perajin yang terjadi di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang.

1.6.6 Kerangka Berpikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan suatu elemen penting dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk memperjelas dan fokus pada pembahasan terhadap permasalahan utama. Pada penelitian ini, fokus utama yang akan dianalisis adalah mengenai pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang. Penelitian ini mengacu pada pemberdayaan UMKM perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang sebagai upaya dalam mengatasi masalah penurunan jumlah perajin. Untuk memahami dan menganalisis mengenai pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi penurunan jumlah perajin batik di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang, maka diperlukan penguraian konsep-konsep utama menjadi indikator-indikator yang dapat diukur secara empiris. Pendekatan operasionalisasi ini bertujuan agar konsep abstrak yang digunakan dalam kerangka teori dapat diukur melalui dimensi dan indikator yang relevan.

Penelitian ini mengacu pada teori menurut Suharto (2004) yang menyebutkan bahwa ada empat dimensi yang dapat menilai sejauh mana pemberdayaan berjalan, termasuk dalam sektor UMKM, yaitu:

1. *Empowering* (kekuatan), yaitu upaya peningkatan kapasitas individu maupun kelompok agar lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan menjalankan usaha.
2. *Protecting* (melindungi), yaitu menekankan akan pentingnya menjaga pelaku usaha kecil dari tekanan eksternal dengan memberikan perlindungan kebijakan dan akses permodalan.

3. *Supporting* (dukungan), dalam hal ini dukungan berupa fasilitasi dan bimbingan agar pelaku UMKM mampu untuk mengembangkan potensi secara berkelanjutan.
4. *Fostering* (pengembangan), yakni menciptakan iklim yang menunjang bagi pertumbuhan usaha serta menjaga akses antar kelompok sehingga tujuan dari pelaku usaha bisa tercapai secara maksimal.

Keempat dimensi tersebut menjadi indikator utama dalam penelitian ini untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang dalam mengatasi penurunan jumlah perajin.

Selain itu juga, keberhasilan pemberdayaan juga ditentukan oleh faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan penelitian Febian dkk. (2024) dan Situmorang dkk. (2025), faktor pendukung mencakup adanya pelatihan keterampilan, penyediaan sarana dan prasarana, serta kebijakan pemerintah yang mendukung akses pasar. Sementara itu, faktor penghambat mencakup adanya keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia terutama regenerasi perajin, serta lemahnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, dalam penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai dimensi-dimensi pemberdayaan serta penelaahan faktor pendukung dan penghambat, guna memperoleh pemahaman mengenai pemberdayaan perajin yang dilaksanakan di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Tabel 1.4 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Definisi Konseptual	Gejala yang diamati
Pemberdayaan UMKM	<i>Empowering</i> (Kekuatan)	<i>Empowering</i> (kekuatan), yaitu upaya peningkatan kapasitas individu maupun kelompok agar lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan menjalankan usaha.	Perajin mendapatkan pelatihan membuat, keterampilan meningkat, dan mulai bisa mengelola usaha sendiri.
	<i>Protecting</i> (Melindungi)	<i>Protecting</i> (melindungi), yaitu menekankan akan pentingnya menjaga pelaku usaha kecil dari tekanan eksternal dengan memberikan perlindungan kebijakan dan akses permodalan.	Perajin memperoleh akses modal, merasa usahanya lebih aman, dan adanya perlindungan dari persaingan tidak sehat.
	<i>Supporting</i> (Dukungan)	<i>Supporting</i> (dukungan), yaitu dukungan berupa fasilitasi dan bimbingan agar pelaku UMKM mampu untuk mengembangkan potensi secara berkelanjutan.	Perajin mendapat bantuan dukungan berupa sarana produksi, dukungan kebijakan, dan bantuan dalam pemasaran produk.
	<i>Fostering</i> (Pengembangan)	<i>Fostering</i> (pengembangan), yaitu menciptakan iklim yang menunjang bagi pertumbuhan usaha	Adanya pengembangan desain batik baru, kolaborasi dengan pemerintah maupun swasta, serta

		serta menjaga akses antar kelompok sehingga tujuan dari pelaku usaha bisa tercapai secara maksimal.	monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas terkait.
Faktor Pendukung dan Penghambat	Faktor Pendukung	Faktor yang berperan sebagai pendukung dalam pemberdayaan UMKM tercermin dari adanya dukungan pemerintah, baik melalui penyelenggaraan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, maupun kebijakan yang mempermudah akses pasar.	Tersedianya pelatihan, fasilitas produksi, kebijakan pemerintah, serta peluang dalam pasar batik.
	Faktor Penghambat	Faktor yang berperan sebagai penghambat dalam pemberdayaan UMKM umumnya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, minimnya regenerasi atau rendahnya minat generasi muda, serta permasalahan komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait.	Anggaran yang terbatas, rendahnya regenerasi perajin, komunikasi antar aktor yang masih kurang.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

1.8 Argumen Penelitian

Kampung Batik Rejomulyo merupakan salah satu sentra kerajinan batik yang terkenal di Kota Semarang. Namun, meskipun memiliki potensi budaya dan ekonomi yang besar, Kampung ini menghadapi tantangan yang cukup serius, yaitu penurunan jumlah perajin batik yang terjadi secara konsisten dalam lima tahun terakhir terhitung mulai tahun 2019 hingga tahun 2023. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada keberlangsungan usaha, tetapi juga pada pelestarian batik sebagai warisan budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat karena dianggap sebagai strategi yang tepat untuk memahami dan mengatasi persoalan penurunan jumlah perajin. Pemberdayaan dipandang bukan hanya sebagai program teknis, tetapi sebagai sebuah pendekatan yang melibatkan proses penyadaran, penguatan kapasitas, perlindungan, serta dukungan berkelanjutan kepada masyarakat perajin.

Selain itu, pemberdayaan pada dasarnya bersifat *multi-stakeholders*, artinya keberhasilan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah sebagai fasilitator, tetapi juga pada partisipasi aktif komunitas perajin, dukungan sektor swasta, serta peran lembaga sosial yang terlibat. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang dirancang dan dijalankan melalui keterlibatan berbagai pihak, serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat memengaruhi dinamika tersebut. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai sinergi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan model pemberdayaan yang efektif untuk mengatasi penurunan jumlah perajin sekaligus

menjaga keberlanjutan industri batik sebagai identitas budaya dan sumber ekonomi masyarakat lokal.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi, yaitu penurunan jumlah perajin batik di Kampung Batik Rejomulyo serta menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik antar fenomena yang diteliti.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yang dipilih berada di Kampung Batik Rejomulyo, yang beralamat di Jl. Batik No. 698A, Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampung Batik Rejomulyo menjadi salah satu sentra industri batik di Kota Semarang yang mengalami penurunan jumlah perajin dalam beberapa tahun terakhir. Di lokasi ini, peneliti memiliki kesempatan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas sehari-hari para perajin. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, beralamat di Jalan Pemuda No. 214, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program pemberdayaan UMKM,

termasuk para perajin batik. Penelitian juga dilaksanakan di Dinas Perindustrian Kota Semarang yang berlokasi di Gedung Pandanaran Lantai 4, Jalan Pemuda No. 175, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai bagian dari kajian terhadap dukungan pemerintah dalam pengembangan industri batik.. Pemilihan situs penelitian ini didasarkan pada peran dari Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam membina dan mengembangkan industri batik melalui upaya pembentukan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) batik.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni metode penentuan informan secara sengaja dengan merujuk pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2022) *purposive sampling* digunakan untuk menentukan subjek atau responden, penentuan sumber data pada wawancara yang dilakukan dengan *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menentukan subjek penelitian yang memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam pemberdayaan perajin di Kampung Batik Rejomulyo di antaranya, yaitu:

Tabel 1.5 Subjek Penelitian

No.	Informan	Keterangan/Peran	Alasan Pemilihan Informan
1.	Plt. Kepala Bidang Industri Kimia dan Tekstil Dinas	Pelaksana kebijakan dan program industri tekstil, seperti batik.	Memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam perumusan serta

	Perindustrian Kota Semarang		pelaksanaan program pemberdayaan industri batik di Kota Semarang.
2.	Subkoordinator Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Pelaksana teknis program pemberdayaan UMKM batik.	Mengetahui secara langsung proses pelaksanaan program pemberdayaan, hambatan di lapangan, serta dampaknya terhadap keberlangsungan perajin batik.
3.	Anggota Paguyuban Kampung Batik Rejomulyo	Tokoh komunitas perajin	Mengetahui kondisi nyata perajin, hambatan, serta menjadi jembatan komunikasi antara perajin dan pemerintah.
4.	Ketua RW 02 Kelurahan Rejomulyo	Tokoh masyarakat dan penghubung antara warga dan pemerintah	Mewakili perspektif kelembagaan lokal dalam mendukung proses pemberdayaan serta mengetahui kondisi sosial perajin di wilayahnya.
5.	Perajin Batik	Pelaku utama kegiatan membatik	Dapat memberikan informasi terkait pengalaman dalam mengikuti program pemberdayaan, perubahan jumlah perajin, serta faktor yang mempengaruhi dalam keberlanjutan usaha batik di Kampung Batik Rejomulyo.
6.	Pelaku Usaha Batik	Pengelola usaha batik	Mengetahui kondisi produksi, pemasaran, dan tantangan dalam mempertahankan usaha batik di tengah berkurangnya jumlah perajin.

7.	Ketua Pokdarwis	Pengelola wisata di Kampung Batik Rejomulyo	Mengetahui keterkaitan antara pengembangan wisata batik dengan proses pemberdayaan perajin di Kampung Batik Rejomulyo.
----	-----------------	---	--

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara atau transkrip *interview*, catatan lapangan, foto, dan dokumentasi atau laporan kegiatan pelatihan dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui beberapa pihak terkait dalam menganalisis proses pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang.

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penanganan penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo. Informan penelitian ini meliputi pejabat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Ketua Paguyuban Kampung Batik Rejomulyo, serta perajin batik, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2022) data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip dinas, laporan kegiatan, dan dokumentasi terkait program pemberdayaan perajin batik dan faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam beragam situasi, sumber, dan metode (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam kepada informan terkait, seperti pejabat maupun staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, Ketua Paguyuban Kampung Batik Rejomulyo, serta beberapa perajin batik, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Melalui teknik wawancara ini, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai proses pemberdayaan, dukungan yang diterima, serta kendala yang dihadapi.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan teknik lainnya (Sugiyono,

2022). Observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi Kampung Batik Rejomulyo untuk mengamati secara langsung terkait aktivitas perajin, pelaksanaan pelatihan, serta interaksi antara perajin. Teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang kondisi aktual di lapangan dalam dinamika regenerasi perajin dan keberlangsungan usaha batik di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan lain yang menunjang proses penelitian (Sugiyono, 2022). Dokumentasi dimanfaatkan sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan dokumen resmi serta laporan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Dokumentasi ini penting untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari hasil wawancara dan observasi yang dapat dianalisis oleh peneliti secara mendalam.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, analisis dan interpretasi data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam mengatasi penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo. Merujuk pada Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020) analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan terkait untuk dikumpulkan dan kemudian dilakukan seleksi pada data yang telah diperoleh untuk menyesuaikan apakah relevan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Reduksi Data

Data yang telah terkumpul kemudian direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu proses pemberdayaan masyarakat dan faktor pendukung penghambat dalam upaya mengatasi penurunan jumlah perajin batik. Pada tahapan reduksi data, nantinya akan mendapatkan data secara ringkas yang diperoleh dari data primer dan sekunder sehingga data yang didapatkan akan lebih mudah untuk dipahami.

c. Penyajian Data

Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai bagaimana proses pemberdayaan dijalankan di Kampung Batik Rejomulyo Kota Semarang. Penyajian juga menekankan pada sinergi antar pemangku kepentingan, kendala yang dihadapi, serta potensi solusi kolaboratif.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi secara mendalam terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna, dampak, serta solusi dari permasalahan penurunan jumlah perajin batik.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian sehingga hasil yang diperoleh bersifat dinamis dan dapat diverifikasi ulang dengan data temuan baru.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, diterapkan teknik triangulasi sumber data untuk memastikan keandalan dan validitas data pada penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, antara lain melalui observasi langsung, studi dokumen tertulis, serta wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi penurunan jumlah perajin di Kampung Batik Rejomulyo, Kota Semarang.